

**PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR :  
STUDI KOMPARATIF**

Anisa Nur Amelia  
NPP 32.0714

*Asdaf Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email : [32.0714@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0714@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi : Arina Romarina, S.E.,M.Ec.Dev

**ABSTACT**

**Problem Statment/Background (GAP):** This research examines the implementation of the Village Financial System (Siskeudes) in managing village finances in Kotawaringin Timur Regency, with a comparative study between Eka Bahurui Village and Sungai Paring Village. The main issue raised is the suboptimal implementation of Siskeudes and the factors influencing it in both villages. **Purpose:** to analyze the implementation of Siskeudes, as well as to identify supporting and inhibiting factors. **Method:** this research uses descriptive qualitative methods, with data collected through observation, interviews, and documentation. Informants include village officials, DPMD, BPD, and the community. **Results:** It shows that both villages have met the financial management regulation standards. However, Village Eka Bahurui implements Siskeudes optimally with real-time input (supported by strategic location, competent HR, and active participation), although facing challenges in application updates and access coordination. Meanwhile, Village Sungai Paring faced network and HR challenges, despite being supported by participation and commitment from village officials. **Conclusion:** the implementation of the Village Financial System (Siskeudes) in village financial management in Kotawaringin Timur Regency has successfully achieved regulatory compliance standards in Village Eka Bahurui and Village Sungai Paring. Nevertheless, it is recommended that local governments focus on equalizing quality, improving HR capacity, providing technical guidance, and developing network infrastructure in remote villages.

**Keywords:** Village Financial System, Village Fund Management, Transparency, Accountability.

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Penelitian ini mengkaji penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan studi komparatif antara Desa Eka Bahurui dan Desa Sungai Paring. Permasalahan utama yang diangkat adalah belum optimalnya implementasi Siskeudes serta faktor-faktor yang memengaruhinya di kedua desa tersebut. **Tujuan:** untuk menganalisis penerapan Siskeudes, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. **Metode :** penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Informan meliputi perangkat desa, DPMD, BPD, dan masyarakat. **Hasil** : menunjukkan kedua desa telah memenuhi standar peraturan pengelolaan keuangan. Namun, Desa Eka Bahurui mengimplementasikan Siskeudes secara optimal dengan input *real-time* (didukung lokasi strategis, SDM mumpuni, partisipasi aktif), meski terkendala pembaruan aplikasi dan koordinasi akses. Sementara itu, Desa Sungai Paring menghadapi kendala jaringan dan SDM, meskipun didukung partisipasi dan komitmen perangkat desa. **Kesimpulan** : penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kotawaringin Timur telah berhasil mencapai standar kepatuhan regulasi di Desa Eka Bahurui dan Desa Sungai Paring. Meskipun demikian, Disarankan pemerintah daerah fokus pada penyetaraan kualitas, peningkatan kapasitas SDM, panduan teknis, dan pengembangan infrastruktur jaringan di desa terpencil.

Kata Kunci : Sistem Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong transformasi pengelolaan administrasi pemerintahan di Indonesia menuju e-Government, menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, terbuka, dan akuntabel (Ariyanto et al. 2022). Dalam konteks ini, tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya transparansi dan akuntabilitas manajemen, terutama dalam pengelolaan keuangan desa (Wasistiono 2003).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting dalam sistem otonomi desa, memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk mengelola aset dan keuangan desa (Rauf et al 2015). Dana Desa yang dialokasikan melalui APBN (minimal 10% dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) bertujuan memperkuat otonomi desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Berdasarkan data, alokasi Dana Desa selama periode 2019-2023 menunjukkan fluktuasi: meningkat dari Rp 70 Triliun (2019) menjadi Rp 72 Triliun (2020-2021), menurun menjadi Rp 67,9 Triliun (2022), dan kembali naik menjadi Rp 70 Triliun (2023). Fluktuasi ini mencerminkan dinamika kebijakan fiskal pemerintah menyesuaikan prioritas pembangunan nasional dan kondisi ekonomi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan dilaksanakan secara tertib dengan disiplin anggaran (Made et al. 2020). Pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi penggunaan APB Desa sesuai format dan standar akuntansi yang berlaku (Karjunu Dt. Maa 2009).

Untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, BPKP bersama Kemendagri telah menghadirkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini membantu perangkat desa dalam membuat berbagai laporan penting seperti perencanaan pembangunan, pencatatan keuangan, dan pelaporan penggunaan anggaran (Usman, Sundari 2024). Siskeudes menjadi sistem wajib berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No. 143/8350/BPD (2015) dan Surat Edaran KPK No. B.7508/01/16/16/08/2016.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mulai resmi menggunakan aplikasi Siskeudes pada tahun 2022, dengan 168 desa secara bertahap mengaktifkan dan

menggunakannya. Desa Eka Bahurui di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menjadi salah satu desa yang berhasil menerapkan Siskeudes dengan baik hingga terpilih sebagai desa percontohan untuk uji coba Siskeudes non-tunai tahun 2024. Sementara itu, Desa Sungai Paring di Kecamatan Cempaga juga telah mengoptimalkan penggunaan Siskeudes sesuai dengan kemampuan desa tersebut.

Meskipun kedua desa tersebut telah menerapkan Siskeudes, terdapat perbedaan dalam implementasinya. Desa Eka Bahurui menjadi desa percontohan untuk Siskeudes non-tunai karena keberhasilannya, sementara Desa Sungai Paring mengoptimalkan penggunaan sistem tersebut sesuai kapasitasnya. Data alokasi Dana Desa tiga tahun terakhir (2022-2024) menunjukkan tren peningkatan di kedua desa, dengan Desa Eka Bahurui menerima Rp698.133.000 dan Desa Sungai Paring Rp710.019.000 pada tahun 2024. Berdasarkan perbedaan tersebut, penelitian ini mengambil fokus pada studi komparatif penerapan Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya pada dua desa dengan karakteristik penerapan yang berbeda.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Transformasi digital administrasi pemerintahan desa melalui e-Government dan implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan implementasi yang optimal. Permasalahan utama yang muncul adalah kurangnya infrastruktur pendukung, terutama fasilitas jaringan yang memadai. Sebagai contoh, Desa Sungai Paring di Kecamatan Cempaga mengalami kendala dalam penggunaan Siskeudes akibat minimnya jaringan yang stabil. Keterbatasan ini menghambat konektivitas dan efektivitas penggunaan aplikasi Siskeudes, yang seharusnya mempermudah pengelolaan keuangan desa.

Selain kendala teknis, terdapat pula GAP dalam hal sumber daya manusia. Banyak perangkat desa yang belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan Siskeudes secara efisien. Hal ini kontras dengan tujuan awal digitalisasi, yaitu untuk mempercepat proses administrasi dan mengurangi kesalahan manusia. Akibatnya, potensi Siskeudes sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya terealisasi. Di sisi lain, Desa Eka Bahurui di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menonjol sebagai contoh desa yang berhasil menerapkan Siskeudes dengan baik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang memadai dan komitmen yang kuat, implementasi Siskeudes yang optimal dapat dicapai.

Kondisi ini diperparah oleh tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar. Kasus-kasus dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana desa, seperti yang terjadi di Kecamatan Tanawawo, menyoroti pentingnya tata kelola keuangan desa yang baik. Oleh karena itu, mengatasi GAP permasalahan dalam implementasi Siskeudes, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia, menjadi krusial untuk mewujudkan otonomi desa yang bertanggung jawab dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, seperti yang diupayakan di Desa Eka Bahurui dan yang masih menjadi tantangan di Desa Sungai Paring.

## **1.3 Penelitian terdahulu**

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait penerapan Siskeudes di berbagai desa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Siskeudes memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan desa dan membantu dalam penyelesaian laporan keuangan tepat waktu. Misalnya, penelitian (Pujiani, dan Astuti 2022) menemukan bahwa

penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Jerowaru menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien. Penelitian (Umayah, Arisyahidin, and Mutiara 2022) juga mencatat bahwa perangkat desa di Kabupaten Kediri terbantu dengan adanya aplikasi Siskeudes. Namun, terdapat juga penelitian yang menyoroti kendala dalam implementasi Siskeudes, seperti kurangnya aparatur desa yang berkualitas, kurangnya pelatihan, masalah jaringan, dan kesalahan operator. Penelitian (Nadaa et al. 2023) menemukan bahwa Desa Karang Mukti belum mampu menggunakan aplikasi Siskeudes secara optimal karena faktor-faktor tersebut. Selain itu, ada penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda terkait pengaruh Siskeudes terhadap pengelolaan keuangan desa, seperti penelitian (Nurak, Mitan, dan Kutu Go'o 2023) yang menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Nita tidak dipengaruhi oleh penggunaan aplikasi Siskeudes. Penelitian (Sari and Asmara 2021) menemukan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, tetapi transparansi tidak selalu berjalan seiring dengan akuntabilitas.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada konteks penelitian dan pendekatan metodologisnya. Konteks penelitian ini adalah analisis komparatif penerapan Siskeudes di dua desa dengan karakteristik berbeda dalam satu kabupaten, yaitu Desa Eka Bahurui dan Desa Sungai Paring di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika implementasi Siskeudes di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini menggunakan indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Nurak, Mitan, dan Kutu Go'o 2023) dan juga peneltia yang dilakukan oleh (Sari , Asmara 2021) ,dimana indikator yang diunakan yakni pendapat dari Charles O. Jones (1996) yang menyatakan bahwa implementasi terdiri dari tiga aktivitas utama sangat penting yaitu organisasi, interpetasi, penerapan. Penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai bagaimana penerapan Siskeudes di Desa Eka Bahurui dan Desa Sungai Paring, serta mengetahui mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengimplementasian Siskeudes di Desa Eka Bahurui dan Desa Sungai Paring yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

## **II. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan bersifat komprehensif, meliputi data primer dan data sekunder (Simangunsong 2017) . Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari sumber tidak langsung seperti buku, arsip, dan dokumen (Nurdin 2019). Peneliti berperan sebagai instrumen utama atau *human instrument* dalam mengumpulkan data di lapangan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan berpusat pada tiga metode: observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi (Sugiono 2015). Dalam pengumpulan data kualitatif, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Dimana total informan yang diwawancarai adalah 24 orang. Lokasi penelitian langsung dilakukan di Kantor Desa Eka Bahurui dan Desa Sungai Paring di Kabupaten Kotawaringin Timur. Analisis data

menggunakan metode Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Penerapan Sistem Keuangan Desa Di Desa Eka Bahurui dan Desa Sungai Paring**

##### **1. Penerapan Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Siskeudes, sebagai aplikasi terintegrasi yang dirancang oleh pemerintah pusat, bertujuan untuk mempermudah pemerintah desa dalam mengelola keuangan dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, guna mewujudkan pengelolaan yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran, sekaligus memfasilitasi penyusunan RKPDesa dan APBDesa sesuai regulasi seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Pada Desa Eka Bahurui hasil wawancara dengan Sekretaris Desa secara jelas menunjukkan bahwa Siskeudes sangat membantu dan mempercepat proses pelaporan serta pencatatan keuangan desa karena sistemnya terhubung langsung dengan pemerintah daerah, sehingga data yang diinput lebih riil dan sulit dimanipulasi; meskipun terkadang mengalami kendala jaringan, aplikasi ini dinilai sangat membantu keseluruhan proses keuangan desa. Secara lebih detail, dampak positif yang teridentifikasi adalah pencatatan transaksi keuangan menjadi lebih terstruktur, sistematis, meminimalisir kesalahan administrasi, dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa, serta efisiensi proses pelaporan yang lebih tepat waktu dan akurat memungkinkan aparat desa untuk fokus pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada Desa Sungai Paring, wawancara dengan aparat desa juga mengkonfirmasi bahwa Siskeudes telah digunakan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa—mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan—sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Aparatur desa di Sungai Paring juga merasakan manfaat dari aplikasi ini dalam membantu proses pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

Secara komparatif, kedua desa telah mengimplementasikan Siskeudes sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, dengan Desa Eka Bahurui menunjukkan efisiensi yang lebih menonjol dalam aspek pelaporan dan pencatatan, namun kedua desa merasakan manfaat fundamental dari aplikasi ini. Temuan ini konsisten dengan penelitian Seli Agustina (2024:76) dan Pujiani dan Astuti (2022) yang menyatakan bahwa penggunaan Siskeudes memberikan dampak positif dan kemudahan dalam pengelolaan keuangan desa.

##### **2. Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pendukung Siskeudes**

Kualitas organisasi desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 serta ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terlatih adalah faktor krusial bagi keberhasilan implementasi Siskeudes, karena struktur yang jelas dan SDM yang mampu akan memastikan prosedur dan penggunaan aplikasi berjalan dengan baik dan optimal. Pada Desa Eka Bahurui, keberhasilan dan efisiensi yang ditunjukkan dalam pemanfaatan Siskeudes secara implisit mengindikasikan adanya SDM yang kompeten dalam mengoperasikan aplikasi tersebut serta dukungan dari struktur organisasi yang memadai di desa tersebut. Sama halnya dengan Desa Sungai Paring, fakta bahwa mereka menggunakan Siskeudes di setiap tahapan pengelolaan keuangan menunjukkan adanya peran organisasi dan kapasitas SDM yang cukup untuk menjalankan sistem. Dalam perbandingan, keberhasilan implementasi Siskeudes di kedua desa sangat bergantung pada SDM yang berkualitas dan struktur organisasi yang mendukung, menguatkan temuan penelitian sebelumnya seperti Nadaa

et al. (2023) yang mengidentifikasi kurangnya aparatur desa yang berkualitas dan minimnya pelatihan sebagai hambatan signifikan terhadap optimalisasi Siskeudes di beberapa lokasi.

### **3. Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengawasan pengelolaan keuangan desa merupakan elemen vital untuk memastikan tercapainya akuntabilitas dan transparansi, melibatkan berbagai pihak termasuk kepala desa, aparat kecamatan, pemerintah pusat melalui mekanisme monitoring dan evaluasi, serta partisipasi aktif masyarakat, sebagaimana diatur ketat dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Desa Eka Bahurui, Sekretaris Desa menjelaskan bahwa proses pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti aparat kecamatan yang rutin melakukan monitoring dan evaluasi untuk memperkecil potensi kesalahan, dengan hasil monitoring kemudian dikirimkan ke pemerintah pusat; di samping itu, masyarakat juga secara aktif terlibat dalam mengawasi kesesuaian pengelolaan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pada Desa Sungai Paring, Sekretaris Desa menyatakan bahwa kepala desa bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan keuangan desa, dan pihak yang mengawasi secara langsung adalah pemerintah kecamatan serta masyarakat desa. Secara komparatif, kedua desa menunjukkan adanya mekanisme pengawasan yang berjalan dan melibatkan berbagai pihak sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang merupakan indikator kuat upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan pihak eksternal seperti kecamatan dan pemerintah pusat, serta partisipasi masyarakat, merupakan elemen kunci yang konsisten dengan penelitian Welly et al. (2021) yang menjelaskan bahwa penggunaan Siskeudes di setiap tahapan pengelolaan keuangan desa memfasilitasi transparansi.

### **4. Perencanaan Keuangan Desa dengan Siskeudes**

Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa haruslah sistematis dan sesuai dengan kerangka regulasi yang ada, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang berujung pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), di mana Siskeudes memegang peran penting sebagai alat bantu dalam memfasilitasi dan menyelaraskan penyusunan perencanaan ini. Pada Desa Eka Bahurui, hasil penelitian secara spesifik mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran menjadi jauh lebih terarah berkat fitur-fitur yang disediakan oleh Siskeudes, yang secara efektif memfasilitasi penyusunan RKPDesa dan APBDesa sesuai dengan regulasi yang berlaku, menggambarkan bagaimana aplikasi ini mendukung penyusunan rencana keuangan yang sistematis dan terstruktur. Serupa dengan itu, di Desa Sungai Paring, wawancara dengan bendahara desa mengkonfirmasi bahwa proses perencanaan di desa tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Siskeudes telah membantu secara signifikan dalam penyusunan rencana-rencana tersebut. Dalam perbandingan, kedua desa secara konsisten menunjukkan bahwa Siskeudes telah diintegrasikan secara efektif dalam seluruh siklus proses perencanaan keuangan desa, dengan hasil yang berupa APB Desa yang memenuhi standar dan peraturan yang ditetapkan. Hal ini semakin memperkuat kesimpulan yang sejalan dengan penelitian (Arbi Setiawan, Rida Prihatni (2024)), yang keduanya menyatakan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan secara konsisten berpedoman pada aplikasi Siskeudes.

## **3.2 Faktor Pendukung Penerapan Siskeudes**

### **1. Desa Eka Bahurui**

#### **a. Lokasi Geografis yang Strategis**

Desa Eka Bahurui memiliki keuntungan geografis karena terletak di area yang masih termasuk wilayah perkotaan Kabupaten Kotawaringin Timur. Posisi strategis ini memberikan akses yang relatif mudah terhadap pusat pemerintahan dan pengembangan teknologi. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, khususnya jaringan internet yang stabil dengan bandwidth yang mencukupi, menjadi pendukung utama keberhasilan implementasi Siskeudes. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengkonfirmasi bahwa kondisi wilayah yang masih termasuk dalam kota Sampit memberikan stabilitas jaringan yang dibutuhkan untuk pengoperasian Siskeudes.

#### **b. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kompetensi teknis yang memadai dari staf desa menjadi salah satu faktor pendukung utama. Sekretaris Desa Eka Bahurui menyatakan bahwa staf desa telah mengikuti pelatihan khusus dan memiliki pemahaman yang baik tentang sistem keuangan desa. Selain pelatihan formal, desa ini juga menerapkan sistem diskusi internal rutin untuk membahas kendala operasional Siskeudes. Kaur Keuangan Desa menekankan pentingnya komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi serta sistem pendampingan internal bagi staf baru. Investasi pengembangan SDM ini menjadi kunci keberhasilan digitalisasi administrasi pemerintahan desa.

#### **c. Kontribusi Aktif Masyarakat**

Partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa membantu meningkatkan kualitas input data dan output Siskeudes. Kepala Desa Eka Bahurui menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat membuat perencanaan anggaran melalui Siskeudes menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Ketua BPD Desa menambahkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa mendorong aparat desa untuk lebih teliti dan akurat dalam menginput data. Mekanisme kontrol sosial ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

### **2. Desa Sungai Paring**

#### **a. Kontribusi Masyarakat**

Dukungan aktif dari tokoh masyarakat dan BPD menjadi faktor pendukung signifikan dalam implementasi Siskeudes di Desa Sungai Paring. Sekretaris Desa menyatakan bahwa para tokoh masyarakat selalu mendorong transparansi keuangan desa, sementara BPD secara rutin melakukan pengawasan dan memberikan masukan konstruktif terhadap laporan keuangan. Keterlibatan ini menciptakan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa dan menjadikan penggunaan Siskeudes tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kepercayaan publik.

#### **b. Komitmen Perangkat Desa**

Kepala Desa Sungai Paring menekankan bahwa meski menghadapi keterbatasan fasilitas pendukung, komitmen internal perangkat desa menjadi faktor krusial dalam penerapan Siskeudes. Kerjasama dan kekompakan aparat desa dalam mengatasi berbagai kendala, termasuk evaluasi mingguan penerapan Siskeudes, menciptakan lingkungan kerja yang

mendukung proses adaptasi terhadap sistem baru. Hal ini meningkatkan motivasi seluruh perangkat desa untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan Siskeudes.

### **3.3 Faktor Penghambat Penerapan Siskeudes**

#### **1. Desa Eka Bahurui**

##### **a. Pembaruan Aplikasi dan Periode Maintenance**

Meskipun tergolong sebagai desa percontohan, Desa Eka Bahurui menghadapi tantangan terkait pembaruan aplikasi Siskeudes. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa periode maintenance yang sering terjadi setiap kali ada pembaruan dari pemerintah pusat menyebabkan sistem tidak dapat diakses selama beberapa hari. Kaur Keuangan menambahkan bahwa setiap pembaruan aplikasi biasanya diikuti dengan periode maintenance yang cukup panjang, sekitar 3-4 hari kerja, yang mengganggu konsistensi pekerjaan dan menciptakan beban kerja tambahan. Perubahan tampilan atau alur kerja aplikasi juga membutuhkan waktu adaptasi tambahan bagi operator. Kondisi ini menunjukkan perlunya perencanaan pembaruan sistem yang lebih terkoordinasi dengan mempertimbangkan siklus kerja pemerintahan desa.

##### **b. Kebebasan Akses Aplikasi**

Sistem akses Siskeudes yang dapat digunakan oleh berbagai perangkat desa seperti Kaur dan Kasi menimbulkan permasalahan berupa kesalahan input data. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa hal ini terkadang menyebabkan double input atau perubahan data yang tidak terkoordinasi dengan baik. Operator Siskeudes menambahkan bahwa kekeliruan sering terjadi saat Kaur atau Kasi masuk ke fitur yang bukan bidangnya, mengakibatkan data yang sudah diverifikasi berubah tanpa sepengetahuan operator utama. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengguna yang memiliki akses terhadap sistem, semakin tinggi pula risiko terjadinya human error yang dapat berdampak pada integritas data.

#### **2. Desa Sungai Paring**

##### **a. Keterbatasan Jaringan Internet**

Masalah infrastruktur telekomunikasi menjadi penghambat utama implementasi Siskeudes di Desa Sungai Paring. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa lokasi desa yang berada cukup jauh dari pusat kota mengakibatkan kualitas sinyal yang sering hilang. Kondisi ini menyebabkan data yang sudah dimasukkan tidak tersimpan dengan baik dan harus diulang dari awal. Operator Siskeudes menambahkan bahwa untuk melakukan sinkronisasi data dengan server pusat, mereka sering harus menunggu hingga mendapatkan koneksi yang stabil. Situasi ini menunjukkan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur digital hingga ke daerah pedesaan untuk mendukung efektivitas implementasi sistem informasi pemerintahan desa.

##### **b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Minimnya SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi dan pengelolaan keuangan menjadi kendala serius di Desa Sungai Paring. Kepala Desa mengungkapkan bahwa banyak perangkat desa belum terbiasa dengan sistem komputerisasi, sehingga proses adaptasi terhadap Siskeudes membutuhkan waktu lebih lama. Bendahara Desa mengalami kesulitan dalam memahami beberapa fitur Siskeudes, terutama yang terkait penatausahaan dan pelaporan, sehingga sering bergantung pada bantuan pendamping desa atau operator dari desa lain. Kondisi ini menunjukkan pentingnya program peningkatan kapasitas SDM desa yang berkelanjutan dan sistem pendampingan yang lebih intensif.

### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komparatif dengan membandingkan implementasi Siskeudes di Desa Eka Bahurui dan Desa Sungai Paring. Dimana temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Prihatni (2024) dimana dijelaskan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa seperti tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana dalam setiap tahapan tersebut sudah menggunakan aplikasi siskeudes sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dijalankan dengan transparan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengelolaan keuangan desa di kedua lokasi studi (Desa Eka Bahurui dan Desa Sungai Paring) secara umum telah memenuhi standar peraturan dimana mengindikasikan adanya tingkat kepatuhan yang baik terhadap regulasi terkait pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh dimana dikatakan bahwa jalannya aplikasi siskeudes berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam jalannya setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga menunjukkan hasil yang sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Seli Agustina (2024) dimana dikatakan bahwa Aplikasi Siskeudes menunjukkan kesesuaian dengan prinsip informasi keuangan yang dapat diuji secara konsisten. Kemampuan verifikasi yang kuat tercermin dalam konsistensi data, dukungan verifikasi multi-pihak, dan penggunaan format standar. Pada Penelitian ini jugai selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradana and Faysal (2022) yang mengatakan bahwa BPD pada aspek menentukan standar yang digunakan untuk dasar pengawasan sudah baik. Pada aspek mengukur pelaksanaan, BPD berperan untuk mengawasi setiap program yang sudah atau belum berjalan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui apabila adanya kekeliruan dalam jalannya pembangunan desa.

### 3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pada penelitian ini, penulis menemukan beberapa faktor utama yang secara signifikan memengaruhi optimalisasi penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kotawaringin Timur. Faktor-faktor ini mencakup: 1) lokasi geografis desa, 2) kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa, 3) tingkat partisipasi masyarakat, 4) permasalahan pembaruan aplikasi Siskeudes, dan 5) koordinasi akses data.

Hambatan utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini muncul dari kondisi spesifik di kedua desa. Di Desa Sungai Paring, kendala utama adalah keterbatasan jaringan internet yang menghambat penginputan data secara optimal, serta kualitas SDM perangkat desa yang belum merata. Meskipun Desa Sungai Paring memiliki partisipasi masyarakat dan komitmen perangkat desa, kedua faktor penghambat ini secara signifikan memengaruhi efektivitas penerapan Siskeudes. Sementara itu, di Desa Eka Bahurui, yang secara umum telah mengimplementasikan Siskeudes secara optimal dengan penginputan *real-time* berkat lokasi strategis, SDM mumpuni, dan partisipasi masyarakat aktif, ditemukan hambatan terkait permasalahan pembaruan aplikasi serta kebebasan akses yang kurang terkoordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan pada desa yang sudah optimal pun, tantangan teknis dan koordinasi tetap menjadi isu krusial. Upaya perbaikan dan optimalisasi seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas SDM perangkat desa di seluruh desa. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius pada pengembangan infrastruktur jaringan internet, terutama di desa-desa yang masih terpencil atau memiliki akses terbatas, guna memastikan bahwa kendala teknis tidak lagi menjadi penghambat utama. Peningkatan koordinasi dalam pembaruan aplikasi dan pengelolaan akses data juga diperlukan untuk menjaga konsistensi dan integritas sistem. Rekomendasi ini bertujuan untuk mencapai penyeteraan kualitas pengelolaan

keuangan desa di seluruh Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga Dana Desa dapat dikelola secara lebih efektif, akuntabel, dan transparan untuk mendukung pembangunan desa

#### IV. Kesimpulan

Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Eka Bahurui dan Desa Sungai Paring menunjukkan adanya variasi dalam keberhasilan penerapan. Desa Eka Bahurui memiliki keunggulan karena lokasi geografisnya yang strategis, ketersediaan SDM yang kompeten, dan partisipasi aktif masyarakat. Sementara Desa Sungai Paring, meskipun memiliki komitmen perangkat desa dan kontribusi masyarakat yang baik, masih menghadapi kendala infrastruktur jaringan dan keterbatasan SDM. Faktor penghambat di Desa Eka Bahurui lebih bersifat teknis, meliputi periode maintenance aplikasi dan masalah akses sistem yang belum terbatas. Sedangkan Desa Sungai Paring menghadapi tantangan yang lebih mendasar yaitu ketidakstabilan jaringan internet dan minimnya perangkat desa yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Untuk mengoptimalkan implementasi Siskeudes, diperlukan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur jaringan di desa terpencil, serta perbaikan sistem akses aplikasi. Pendekatan yang mempertimbangkan keunikan karakteristik setiap desa menjadi kunci dalam mewujudkan digitalisasi administrasi desa yang merata dan efektif.

**Keterbatasan Penelitian :** Penelitian ini memiliki keterbatasan mencakup cakupan geografis yang sempit (dua desa di Kotawaringin Timur), durasi penelitian yang singkat sehingga tidak menangkap perubahan dinamis Siskeudes, serta dominasi data kualitatif tanpa analisis kuantitatif mendalam.

**Arah Masa Depan Penelitian :** Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus dengan mengevaluasi kinerja keuangan desa jangka panjang pasca-implementasi Siskeudes. Selain itu, eksplorasi sinergi Siskeudes dengan teknologi pendukung dan inovasi lain juga menjadi area penelitian menarik untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa di Kabupaten Kotawaringin Timur.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Desa Eka Bahurui dan Desa Sungai Paring di Kabupaten Kotawaringin Timur dan seluruh pihak yang membantu menyukseskan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Setiawan<sup>1\*</sup>, Rida Prihatni<sup>2</sup>, Dwi Handarini<sup>3</sup>. 2024. "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Siskeudes Di Desa Kabupaten Bogor." 5(3): 613–25.
- Ariyanto, Dodik, Ayu Aryista Dewi, Henny Triyana Hasibuan, and Rizky Bagus Paramadani. 2022. "The Success of Information Systems and Sustainable Information Society : Measuring the Implementation of a Village Financial System."
- Dr.Rahyunir Rauf, M.si dan Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si. 2015. *Pemerintah Desa*. 1st ed. ed. M.Hum Dr. Yusri Munaf, SH. yogyakarta: Zanafa Publishing.
- Fernandes Simangunsong. 2017 *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung.
- Ismail Nurdin, S. Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya.

- Karjuno Dt. Maa. 2009. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik." *Demokrasi* no 1(VIII): 48.
- Made, Ni, Mei Anggreni, Dodik Ariyanto, and Herkulanus Bambang. 2020. "Successful Adoption of the Village 's Financial System." 6(6): 1129–38.
- Nadaa, Debrina et al. 2023. "Inovasi Digital Dalam Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Digital Innovation in The Implementation Of." 7: 61–73.
- Pradana, Galih Wahyu, and Ahmad Faysal. 2022. "PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 Galih Wahyu Pradana Abstrak." 2022: 2215–30.
- Pujiani, Endang Sri, Baiq Anggun Hilendri L, and Widia Astuti. 2022. "Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ( SISKEUDES ) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur )." *Jurnal risma* 2(3): 598–607.  
<http://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/view/253/180>.
- Sadu Wasistiono. 2003. *Manajemen Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung.
- Sari, Nanda, and Jhon Andra Asmara. 2021. "PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA , SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH , DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA ( STUDI PADA DESA DI KABUPATEN ACEH." 6(2): 142–49.
- SELI AGUSTINA. 2024. "PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA MALALIN KABUPATEN ENREKANG."
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan R & D*. Alfa beta Bandung.
- Umayah, Indari, Arisyahidin Arisyahidin, and Nisa Mutiara. 2022. "Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Guna Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Kediri." *Otonomi* 22(1): 101.
- Usman, Asri, Sri Sundari, and Asri Usman. 2024. "The Influence of Village Financial System ( Siskeudes Application ), Transparency , and Internal Control on Fraud Prevention."
- Welly, Welly, M Syahrul Arifin, Rosalina Ghozali, and Nina Sabrina. 2021. "Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Se-Jawa Bali." *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 6(2): 157.
- Yuvensius Venerandus Nurak, Wilhelmina Mitan, and Emilianus Eo Kutu Go'o. 2023. "Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Nita." *Jurnal Rimba : Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi* 1(3): 243–56.